



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

20%

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Nur Rohma Rahmatullah
 Assignment title: JURNAL
 Submission title: PERBANDINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAM...
 File name: jurnal_Roma_123.docx
 File size: 103.5K
 Page count: 7
 Word count: 2,850
 Character count: 19,171
 Submission date: 25-Apr-2024 08:01AM (UTC+0700)
 Submission ID: 2293425015

SIMILARITY INDEX



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Rina Juwita, S.P., MHRIR
NIP.198104172005012001

JIP Jurnal Ilmu Pemerintahan
ISSN 2477-2659
Homepage: ojs.umul.ac.id

PERBANDINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN SANGKULIRANG KABUPATEN KUTAI TIMUR
COMPARISON OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN SANGKULIRANG, EAST KUTAI DISTRICT

Nur Rohma Rahmatullah¹, Ketut Gusawan², Muhammad Jamal Amin³
^{1,2,3}Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFORMATION	ABSTRACT
Vol. xx, No. x Page: XX-XX Published 2024 KEYWORDS Perencanaan, Pengelolaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan. CORRESPONDENCE E-Mail: muhammadrahmatulhika@fkip.umul.ac.id	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan di Kecamatan Sangkulirang dengan menganalisis 3 (tiga) desa yakni Desa Benau Baru Iir, Benau Baru Ulu, dan Desa Perdan untuk melihat bagaimana perbandingan pengelolaan keuangan desa antar tiga wilayah tersebut sebagai sampel penelitian. Menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan permasalahan yang terjadi di kecamatan Sangkulirang, yaitu minimnya pengetahuan aparat desa terhadap penyusunan laporan keuangan desa dan kurangnya koordinasi antara masyarakat dan pemerintah desa serta penyusunan laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

INTRODUCTION
 Dalam UU Nomor 22 tahun 1999, yang selanjutnya mengalami revisi menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, Negara Kesatuan Republik Indonesia menetapkan undang-undang yang mengatur eksistensi desa. Undang-undang tersebut memberikan aturan tentang organisasi pemerintahan desa. Setiap desa diharapkan dapat melanjutkan proses pembangunan di wilayahnya sendiri dengan mengelola sumber daya yang ada. Menurut UU Nomor 72 tahun 2005, pembangunan desa adalah salah satu urusan utama yang menjadi kewenangan pemerintahan desa. Tidak diragukan lagi, penerfektasan pembangunan tersebut akan memerlukan dana ataupun sumber daya penanaman bagi desa. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2004, dana desa yang berasal dari APBN ditransfer melalui APBD kabupaten/kota, untuk dipakai sebagai pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 Bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan di antaranya adalah alokasi dana desa. Untuk menjelasken hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa, anggaran pemerintah yang didistribusikan kepada desa terkait seluruhnya digunakan bagi pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai lembaga yang ada dalam struktur kepastasan pemerintah. Penggunaan dan pengalokasian dana desa haruslah berdasarkan peraturan penyalang-undangan dan ketentuan pemerintah Indonesia yang berlaku. Dengan demikian, alokasi anggaran dana desa tersebut dapat memberikan peningkatan dalam pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pengimplementasian bantuan